

"Power Sharing"

dan Kontrol atas Kekuasaan

Oleh SILAHUDIN

BERDASARKAN hasil Pemilu 1999, yang diikuti oleh 48 partai politik, secara definitif telah diketahui bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), adalah sebagai pemenang dalam pemilu kali ini. Akan tetapi dari kenyataan tersebut, masih adanya partai politik yang tidak mau menerima kekalahannya sebagaimana dipertunjukkan oleh mereka partai politik yang tidak mendulang suara yang diharapkannya, seperti yang berada di dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketidakpuasan mereka, partai politik yang tidak mendapat dukungan suara para pemilihnya, atau partai politik yang kalah tersebut, menurut banyak pengamat sangat berlebihan, padahal pelaksanaan pemilu dapat dikatakan relatif jujur dan adil (jurdil) dan transparan. Realitas pemilu tersebut, secara niscaya seharusnya membawa dampak positif dalam mengembalikan kepercayaan rakyat, jika saja elit-elit politik khususnya mau menerima realitas hasil pemilu, karena di tingkat bawah sesungguhnya sudah bisa menerima, atau dapat dikatakan telah siap untuk berdemokrasi. Tapi ironisnya, justru di tingkat elit-elit politik itu sendiri masih belum bersikap demokratis.

Dari kenyataan egoisme politik di tingkat elit politik tersebut, penundaan penetapan kursi untuk DPR pun berlarut-larut. Padahal yang sesungguhnya substansial adalah bagaimana dalam peradaban politik negara bangsa ini tidak terulang kembali adanya "mabuk"

kekuasaan (politik) sebagaimana dipraktikkan oleh rezim Orde Baru.

MEMANG, pemilu di era reformasi ini dengan multipartainya, merupakan cerminan dari adanya serbaneka kepentingan. Namun begitu, bukan berarti harus kebalasan dengan alasan yang dicari-cari, seperti yang terjadi di KPU dengan menghendaki bagi-bagi kursi oleh partai politik yang tidak memperoleh dukungan suara secara signifikan.

Obyektivitas apalagi yang oleh partai politik tidak mendulang suara untuk duduk di parlemen. Sungguh ironis, kalau terus ngotot ingin menikmati kursi parlemen, sementara secara niscaya tidak memenuhi syarat untuk menduduki kursi parlemen tersebut. Padahal, kalau elit politik tersebut menyadari sesadar-sadarnya yang sangat krusial, adalah mengembalikan kepercayaan rakyat, karena tanpa adanya kepercayaan rakyat dalam roda pemerintahan dan penyelenggaraan negara secara niscaya instabilitas sosial dan politik pun, tak ayal lagi akan menjadi "hantu" pergumulan kehidupan politik negara-bangsanya.

Dengan demikian, obyektivitas mengembalikan kepercayaan rakyat dan kebangkitan negara bangsa ini, sesungguhnya itulah yang signifikan setelah pelaksanaan pemilu ini usai. Sehingga katalisator integratif dalam kehidupan perpolitikan nasional dengan dimensi politik yang demokratis menjadi *sunatullah*, agar uku-

ran keadilan dan kesamaan hak semua elemen bangsa dengan tidak mengabaikan taat asas "konstitusi" dalam berdemokrasi pun tidak bisa diabaikan. Justru untuk melaksanakan keadilan dan kesamaan hak dalam pergumulan kehidupan politik negara bangsa pun dengan bingkai pluralistiknya taat asas konstitusi tersebut merupakan keniscayaan dalam berdemokrasi.

Memang, untuk itulah, struktur politik demokratis sebagai anjakan penilaian aktivitas politik dalam mengembangkan budaya dialog kritis menjadi persoalan yang harus senantiasa menjelma, sehingga karakter *nation building* yang 'tertunda' membuahkan kematangan dan kedewasaan berpolitik, karena kematangan politik sangat penting, sehingga *emotional intelligence* (kecerdasan emosional) anak bangsa ini terpatri dalam tatanan dan sekaligus pergumulan kehidupan politiknya.

Oleh karena itu, menyadari arti penting pluralisme dalam kenyataan pergumulan kehidupan politik, bukan sebaliknya menampik kenyataan pluralismenya, itulah yang senantiasa disaadari oleh komponen bangsanya. Jadi, setiap partai politik yang berjuang untuk memperoleh kekuasaan, kendati merupakan agenda partainya, namun dalam reditas politiknya, yaitu kalah, bukan berarti harus "kasak-kusuk politik" dengan dalih mencari keadilan, sementara di sisi lainnya, justru mengabaikan dan

atau mengingkari yang semestinya taat asas dalam berdemokrasi.

Sesungguhnya, kekalahan dalam berpolitik, bukan harus diratapi, akan tetapi bagaimana mengoreksi diri (introspeksi) ke dalam setiap partai politik yang mengalami kekalahan atau tidak memperoleh kursi di parlemen (?) Itu sebabnya, seharusnya tidak ada yang mabuk kekalahan, namun ironisnya, justru sebaliknya, seperti yang terlihat di KPU oleh mereka partai politik yang tidak mendulang suara secara signifikan. Padahal, persoalan yang krusial, sesungguhnya berada dalam diskursus bagaimana mengontrol dan atau mengendalikan kecenderungan mabuk kemenangan politik dalam pergumulan kepolitikan Indonesia.

SUNGGUH ironis, dalam tontonan politik kita dewasa ini, terutama di KPU, ternyata yang muncul justru yang mabuk kekalahan, sehingga berbagai cara dicari-cari untuk memperoleh kedudukan kursi di parlemen, padahal partainya tidak memenuhi syarat untuk itu. Namun demikian, kenyataan mabuk kemenangan politik (kekuasaan) pun dalam pergaulan perpolitikan nasional harus dicermati. Hal ini paling tidak kita dapat menengok seijama rezim Orde Baru dengan Golkar sebagai pemenangnya, senantiasa ada dalam mabuk kemenangan keku-

asaannya, sehingga realitas pergumulan perpolitikan nasional berada dalam kerangkeng yang diskriminatif, yang menyebabkan kontrol sosial dan kontrol politik pun tidak berdaya (*powerless*).

Dengan perkataan lain, selama rezim Orde Baru, monopoli tafsir, hegemoni negara dan atau intervensi aparaturnegara pada semua wilayah kehidupan serta monoloyalitas, merupakan serangkaian mabuk kemenangan kekuasaan, sehingga dari kenyataan tersebut, perubahan dan pembaharuan politik yang demokratis tidak berjalan secara berarti.

Lalu, bagaimana dengan realitas multipartai dewasa ini (?) Multipartai di era reformasi ini tidak bisa dilepaskan dari adanya serbaneka kepentingan. Itu sebabnya, dalam dataran empirik dan sekaligus pergaulan kehidupan politik nasional dengan bingkai pluralismenya harus dikelola secara kondusif: tidak mengabaikan persamaan hak dan keadilannya, karena dalam aktivitas politik tersebut, dimensi keadilan dan kesamaan hak menjadi pertimbangan mendasarnya. Artinya, oasis kesamaan hak dan keadilan dalam aktivitas politik merupakan keniscayaan di mana konfigurasi politik demokratis harus diwujudkan dalam dataran empirik kepolitikan Indonesia.

Dengan demikian, kekalahan dan kemenangan dalam memperoleh kekuasaan (politik) sebagai konsekuensi logis perjuangannya, sehingga dalam hal ini pun, pemenang pemilu 1999, secara mendasar

harus diberi kesempatan untuk membentuk pemerintahan baru, kendati harus melakukan koalisi, karena tidak memperoleh suara secara mayoritas absolut. Akan tetapi, penting adanya mengontrol kecenderungan mabuk kemenangannya. Untuk itu, *power sharing*, sehingga mekanisme *check and balance*, dengan kontrol sosial dan kontrol politiknya berjalan secara berdaya guna dalam pemerintahan.

Implementasi untuk pemertingannya itu, tiada lain agar budaya tanggung jawab politik dalam kepolitikan nasional menjadi keniscayaan politiknya, sehingga perpolitikan nasional dapat menghindari dan atau mencegah penyelewengan kekuasaan atau sentralisme kekuasaannya karena akibat mabuk kemenangannya. Karena kekuasaan, "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*, kata Lord Acton.

Itu sebabnya, dalam kepolitikan Indonesia, distribusi kekuasaan secara niscaya sangat urgen untuk mencegah, mengendalikan dan membatasi pemusatan kekuasaan (politik), agar keserakahan kekuasaan dapat direm secara signifikan dalam babak baru kepolitikan Indonesia. Akan tetapi, bukan mencari-cari alasan yang tidak logis untuk memperoleh kekuasaan (seperti kursi di parlemen). Karena berpolitik secara demokratis pun adalah penting tetap taat asas terhadap konstitusi. (*)

● **Silahun**, staf pengajar STIA Bagasasi, pemerhati sosial-politik dari Forsospol Bandung.